

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KREDIT MODAL KERJA
ANTARA BANK CENTRAL ASIA DENGAN
TOKO BANGUNAN WAHYU PUTRO DI WONOGIRI**

NASKAH PUBLIKASI SEKRIPSI



Oleh:

PUNGKASA YULIANTO
C. 100 070 112

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2012**

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah publikasi Skripsi ini telah dan diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



Muh. Sandjojo, SH. M. Hum.

Pembimbing II



Inayah, SH. MH.

Mengetahui

Dekan II Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta





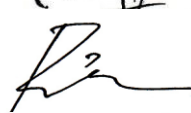
Darsono, SH., M.H

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Kamis
Tanggal : 01 Oktober 2012

Dewan Penguji

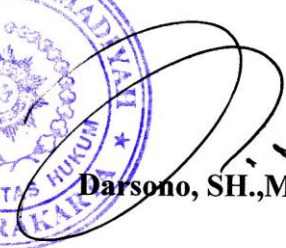
Ketua	: Mohammad Sandjojo, SH., M.H	()
Sekretaris	: Inayah, SH., M.H	()
Anggota	: Septarina Budiwati, SH., M.H	()

Mengetahui

Dekan II Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




Darsono, SH., M.H

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KREDIT MODAL KERJA
ANTARA BANK CENTRAL ASIA DENGAN
TOKO BANGUNAN WAHYU PUTRO DI WONOGIRI**

Oleh:

**PUNGKASA YULIANTO
NIM C. 100 070 112**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui pelaksanaan kredit modal kerja antara Bank Central Asia dengan toko bangunan Wahyu Putro Wonogiri dan upaya dalam menangani debitur wanprestasi.

Metode pendekatan yang diterapkan yaitu yuridis, jenis penelitiannya adalah deskriptif. Jenis data yang dibutuhkan adalah data-data primer dan sekunder, pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka. Dalam menganalisis data, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan dasar pertimbangan yang digunakan Hakim di dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor meliputi : Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggapan terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi, barang bukti perkara yang dihadirkan di dalam persidangan, kesinambungan, kesesuaian dan hubungan antara fakta-fakta hukum dan keterangan antar saksi, hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari si terdakwa, dan keterangan terdakwa tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan hambatan-hambatan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor adalah sulitnya menghadirkan saksi yang mengetahui kejadian pelaku atau terdakwa dalam mendapatkan barangnya dan pembuktian barang ditangan pelaku atau terdakwa bukan karena kejahatan. Hambatan-hambatan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah sulitnya menghadirkan saksi yang mengetahui kejadian pelaku atau terdakwa dalam mendapatkan barangnya dan pembuktian barang ditangan pelaku atau terdakwa bukan karena kejahatan.

Kata Kunci: Debitur, Kredit Modal Kerja, Wanprestasi

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemberian kredit kepada debitur, diperlukan suatu keyakinan dari pihak kreditur bahwa kredit yang telah diserahkan kepada debitur dapat dikembalikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Maka sebelum memberikan kredit, kreditur harus melakukan penelitian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Penelitian yang dilakukan oleh bank ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit yang bermasalah karena hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.

PT. Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Surakarta sebagai salah satu bank swasta di Indonesia yang menyelenggarakan praktek perbankan di Indonesia juga memberikan kredit dengan jaminan hal milik rumah, karena alasan-alasan tersebut di atas dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak milik rumah tersebut, tidak terlepas dari masalah-masalah yang biasa ditemui dan mengingat rumah merupakan benda tetap yang berdiri diatas tanah yang menurut sifatnya termasuk benda yang tidak dapat dipindahtempatkan dan menjadi satu kesatuan dengan tanah, maka timbul pertanyaan bagaimana bentuk ikatan pelaksanaannya dan ketentuan mana yang berlaku apakah termasuk hak tanggungan atau perjanjian lain.

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, penulis lebih menekankan usaha perbankan dalam memberikan kredit. Salah satu fasilitas kredit yang tersedia pada PT. Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Surakarta antara lain pemberian Kredit Modal Kerja. Kredit modal kerja adalah salah satu bentuk hutang yang bisa dimanfaatkan. Kepercayaan nasabah pada BCA merupakan

keputusan yang tepat karena BCA selalu berusaha mendukung kemajuan usaha nasabah pengusaha kecil dan menengah untuk terus mengembangkan bisnis mereka melalui berbagai kredit modal kerja yang sediakan. Pengusaha kecil dan menengah yang sangat banyak jumlahnya di Surakarta sangat potensial bagi perkembangan ekonomi. Pada akhirnya kredit modal kerja yang diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah akan menguntungkan kedua belah pihak. Kredit modal kerja yang disediakan oleh PT. Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Surakarta adalah kredit modal kerja secara umum, *dealer financing* dan *distributor financing*¹.

Dalam perjanjian kredit, para pihak baik itu pihak debitur maupun pihak kreditur sama-sama menghendaki adanya kepastian hukum dalam membuat perjanjian, agar diantara kedua belah pihak baik itu pihak debitur maupun pihak kreditur tidak ada yang diragukan. Maka dibuatlah perjanjian kredit itu secara tertulis oleh para pihak, dan sebagai sumbernya adalah pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”².

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan membawa pada pembahasan yang lebih terarah dari penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan kredit modal kerja antara Bank Central Asia dengan toko bangunan Wahyu Putro Wonogiri?
2. Bagaimana upaya penyelesaian Bank Central Asia apabila terjadi pihak Debitur wanprestasi?

¹ www.bca.co.id, *Produk dan Layanan Bank Central Asia*

² Samuel M. P. Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, Grasindo, Jakarta, 2008, Hal 33.

Adapun metode penelitian ini dengan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk menggambarkan suatu fenomena secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki³. Data yang disajikan diperoleh dari sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna melengkapi penelitian yang dilakukan, maka penulis mempergunakan teknik pengumpulan data wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian perjanjian secara otentik terdapat dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (disingkat KUHPerdata) yang dikenal dengan istilah “Perjanjian”, yaitu dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Perjanjian dapat dibuat secara lisan, dapat pula dalam bentuk tertulis yang berupa suatu akta. Perjanjian yang dibuat secara tertulis biasanya digunakan untuk kepentingan pembuktian, misalnya perjanjian pertanggungan.

Prof. Subekti. R, SH memberikan rumusan Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal⁴. Abdulkadir Muhammad merumuskan “perjanjian” adalah suatu persetujuan dengan mana 2 (dua) orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal

³ *Ibid*, Hal 4 - 5.

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2004, hal 1.

dalam lapangan harta kekayaan⁵. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum⁶.

Menurut Abdulkadir Muhammad, syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu ⁷:

Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (konsensus), Kecakapan para pihak, Suatu hal atau objek tertentu, Adanya suatu sebab yang halal

Menurut R. Setiawan, bahwa suatu perjanjian akan berakhir apabila ⁸:

Ditentukan oleh undang-undang, Undang-Undang menentukan batas berlakunya perjanjian, Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus, Adanya pernyataan penghentian persetujuan atau perjanjian, Perjanjian hapus karena putusan hakim, Tujuan perjanjian telah tercapai.

Ruten dan Asser dalam Patrik memberikan rumusan wanprestasi ⁹: Debitur yang tidak memenuhi kewajibannya, baik karena terlambat atau tidak memenuhinya dengan baik, melakukan wanprestasi, kecuali ia mempunyai alasan yang membenarkan (*behoudens de aanwezigheid van een rechtsvaardigingsgrond*).

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 224.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1996, hal 23.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal 228-232.

⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta, Bandung, 2004, Hal 68.

⁹ Purwahid Patrik, *Azas Itikad Baik dan Keputusan dalam Perjanjian*, FH. UNDIP, Semarang, 1999, Hal 37.

Wanprestasi meliputi 3 hal, yaitu: (1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali; (2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya; (3) Memenuhi prestasi tetapi tidak dengan baik. Alasan mengapa seorang debitur tidak memenuhi kewajiban seperti yang diperjanjikan dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya kesalahan pada diri si debitur adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*). Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang telah diterangkan diatas, maka jika tetap tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan, maka berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap debitur yang lalai dapat dikenakan empat macam sanksi, yaitu ¹⁰: (1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi; (2) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian; (3) Peralihan resiko; (4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan dimuka hakim.

Menurut Bastian dan Suhardjono kredit modal kerja memiliki jangka waktu pengembalian maksimal satu tahun (bisa diperpanjang sesuai kebutuhan) yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai stok barang, piutang dagang, pembelian bahan baku ataupun kebutuhan modal kerja perusahaan lainnya. Untuk kredit modal kerja, bank menyediakan fasilitas kredit modal kerja bagi usaha skala kecil (plafon kredit sampai dengan Rp 500 juta) dan usaha skala menengah (plafon kredit di atas Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar). Kredit modal kerja yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan produksi

¹⁰ *Ibid*, Hal 64

baik peningkatan kuantitatif maupun kualitatif ¹¹. Pengertian kredit modal kerja menurut Denda Wijaya adalah: “kredit yang diberikan bank kepada nasabah (debitur) untuk memenuhi kebutuhan modal kerja debitur”¹².

Bentuk-bentuk dari kredit modal kerja antara lain:

Pertama Kredit modal kerja untuk pedagang, antara lain: Kredit ekspor, Kredit pertokoan, dan sebagainya. *Kedua* Kredit modal kerja bidang industri, antara lain: Kredit modal kerja makanan/minuman dalam kemasan. Kredit modal kerja pabrik, tekstil, dan sebagainya. *Ketiga* Kredit modal kerja untuk bidang perkebunan/pertanian, antara lain: Kredit untuk membeli pupuk Kredit untuk membeli obat-obatan anti hama, dan sebagainya. *Keempat* Kredit modal kerja untuk kontraktor bangunan. *Kelima* Kredit modal kerja untuk perbengkelan pusat service. Dan sebagainya.

Secara umum persyaratan pengajuan permohonan Kredit Modal Kerja di bank, harus melengkapi data-data antara lain mengisi formulir permohonan kredit yang telah disediakan oleh bank, dilampiri ¹³: Foto copy identitatas diri (KTP), Foto copy kartu keluarga (KK), Foto copy Surat Nikah, Foto copy NPWP (Nomor pokok wajib pajak), Foto copy sertifikat SHM/SHGB, IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)/legalisir, Foto copy PBB (Pajak Bumi Bangunan) tahun terakhir, Slip gaji/penghasilan terakhir, Foto copy rekening koran/buku tabungan di bank manapun selama 3-6 bulan terakhir, Foto copy Akte Pendirian / Ijin-ijin usaha berupa SIUP/TDP untuk pengusaha, dan Data-data keuangan laporan rugi laba, catatann penjualan/pembelian, bon faktur pembelian/penjualan untuk pengusaha/wiraswasta dan data lain yang diperlukan untuk proses kredit tersebut.

¹¹ Idra Bastian dan Suhardjono, *Akuntansi Perbankan*, Buku Dua, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2006, Hal 251..

¹² Denda Wijaya, *Manajemen Perbankan*. PT Galia Indonesia, Jakarta, 2001, Hal 27.

¹³ www.klikbca.com/, *Produk dan Layanan BCA*, diakses 23 Juli 2012.

Kemudian setiap permohonan kredit tersebut harus terlebih dahulu diregister kebagian surat masuk dan setelah itu aplikasi dan berkas harus diperiksa secara teliti oleh bagian kredit dalam hal ini *account officer* tentang kelengkapan data-data dokumen yang diserahkan, kebenaran data-data dan dokumen yang diserahkan. Dan kemudian apabila data telah dilengkapi maka proses kredit tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan/ prosedur masing-masing bank dimana pada umumnya adalah: *Account officer* meneliti kembali kebenaran data-data yang diserahkan tersebut apakah sesuai dengan keadaan sebenarnya: verifikasi data sesuai dengan aslinya, cek informasi bank indonesia apakah termasuk daftar black list/ada pinjaman di bank lain, verifikasi penghasilan, bon/faktur penjualan/pembelian, laporan keuangan, verifikasi jaminan/penilaian jaminan dan lainnya, apabila telah sesuai dan layak menurut petugas kredit maka kredit diproses lebih lanjut.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kredit Modal Kerja antara Bank Central Asia dengan Toko Bangunan Wahyu Putro Wonogiri

Kredit Modal Kerja yang diberikan BCA merupakan solusi untuk memberikan dukungan serta kemudahan dalam mencapai tujuan bisnis para debitur, yang diperkuat dengan jaringan bank di seluruh Indonesia.

Pihak BCA dalam melaksanakan pemberian kredit harus merumuskan dan melakukan kebijaksanaan kredit yang sehat. Kebijaksanaan ini dilakukan untuk menciptakan kebijaksanaan kredit yang sesungguhnya dan juga untuk meminimalisir resiko yang terdapat dalam setiap pemberian kredit. Kebijaksanaan yang diperlukan adalah mengenai

jenis dan jumlah kredit yang hendak diberikan oleh bank, kepada siapa diberikannya dan dalam keadaan bagaimana kredit itu diberikan.

Pemberian kredit yang dianut oleh BCA memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut¹⁴ :

“Kredit di bank BCA memiliki nilai ekonomis berupa barang atau uang yang diserahkan oleh pihak Bank ke pihak peminjam. Dalam memberikan kredit menganut unsur kepercayaan maksudnya bahwa pihak BCA percaya bahwa uang yang telah dicairkan untuk peminjam nantinya pasti akan kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan bunga yang telah ditetapkan”.

Adapun proses pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank BCA Cabang Slamet Riyadi Solo berpedoman dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi BCA dan UU Perbankan, serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh BI dan instansi-instansi pemerintah lainnya. Pelaksanaan pemberian kredit modal kerja di BCA dalam tahap permohonan kredit, permohonan kredit tersebut berbentuk perjanjian baku dimana formulir sudah disediakan oleh pihak bank, dengan demikian calon debitur hanya tinggal mengisi bagian yang kosong yang perlu diisi dengan bantuan dari *customer service* kemudian ditandatangani oleh pemohon tanpa adanya proses negosiasi syarat-syarat yang ada dalam permohonan tersebut, perjanjian pengikatannya pun demikian yaitu surat pengakuan hutang. Apabila dilihat dari bentuk perjanjiannya maka termasuk dalam perjanjian bentuk baku (*standard contract*) dimana isi atau klausula-klausula dalam perjanjian tersebut telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank, dan tidak terikat dalam bentuk

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Andy Kurnia selaku Account Officer BCA, tanggal 20 Juli 2012, Pukul 10.00 wib.

tertentu. Perjanjian baku seperti ini tidak mengurangi keabsahan dari perjanjian kredit tersebut.

Isi perjanjian kredit modal kerja dari BCA meliputi¹⁵: Jumlah dan tujuan penggunaan fasilitas kredit, Batas waktu penarikan dan atau penggunaan fasilitas kredit, Bunga dan provisi atau komisi, Pembuktian utang, Syarat-syarat penarikan dan atau penggunaan fasilitas kredit, Pembayaran utang, Denda, Agunan dan atau jaminan, Asuransi, Pernyataan, Hal-hal yang wajib dilaksanakan debitur, Hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan debitur, Kejadian kelalaian, Penggunaan pembayaran, Pajak, Perubahan ketentuan perjanjian kredit, Kuasa, Ketentuan-ketentuan khusus dan Yurisdiksi

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andy Kurnia selaku *Account Officer* BCA, surat kuasa dari penerima jaminan ini biasanya dikuasakan kepada pegawai bank yang bersangkutan atau notaris yang menandatangani akta jaminan. Untuk memperkuat perjanjian perlu adanya saksi-saksi dan keberadaan saksi-saksi ini dibuktikan dengan tanda tangan para saksi dengan diberinya ruang untuk menyebutkan saksi-saksi dalam kontrak atau perjanjian. Sekaligus ada ruang untuk menempatkan tanda tangan para pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja antara BCA dengan debitur Sugeng Wuryanto selaku pemilik Toko Bangunan Wahyu Putro Wonogiri sudah sesuai dengan ketentuan syarat syahnya perjanjian dan asas hukum

¹⁵ Contoh Draft Notariil perjanjian kredit dari Bank BCA atas nama debitur Sugeng Wuryanto. No. 153/149/KRD/SLO/VR selaku pemilik Toko Bangunan Wahyu Putro Wonogiri.

perjanjian. Sebelum debitur menandatangani perjanjian terdapat beberapa persyaratan kelengkapan berkas dokumen kredit yang harus dipenuhi diantaranya: Fotocopy KTP suami-istri pemohon, Fotocopy Kartu Keluarga, NPWP, HO, SIUP, TDP (bila ada), Laporan Keuangan sederhana 3 bulan terakhir, Fotocopy sertifikat/BPKB dan STNK dari agunan, dan Lampiran histori pembayaran nasabah (debitur lama atau debitur bank lain bila ada)

Selain itu juga ada proposal pengajuan kredit modal kerja dari debitur yang isinya meliputi latar belakang usaha, data kepemilikan usaha, SIUP, NPWP, kondisi pasar, laporan keuangan selama 3 bulan terakhir, dana yang dibutuhkan dan rincian alokasi dana dari kreditur. Kemudian bagian pelayanan dan administrasi kredit memberikan berkas permohonan kepada Bagian Account Officer akan memdestribusikannya ke pejabat yang berwenang.

Debitur yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan telah mengajukan permohonan kredit akan dianalisa sesuai dengan prosedur pemberian kredit yang dilaksanakan pada pihak bank. Apabila dari hasil analisa bank diputuskan permohonan kredit diterima, maka dilakukan negoisasi antara bank dengan calon debitur untuk menetapkan tipe, struktur dan syarat-syarat kredit. Apabila diperoleh kesepakatan antara bank dengan calon debitur, dibuatlah perjanjian kredit. Setelah seluruh syarat-syarat kredit dan aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan maka pencairan kredit dapat dilakukan.

2. Upaya Penyelesaian Bank Central Asia Apabila Terjadi Pihak Debitur Wanprestasi

Menurut BCA yang dimaksud wanprestasi adalah debitur lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian kredit. Perbuatan wanprestasi yang dilakukan debitur ini menimbulkan kredit macet yaitu nasabah tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran beberapa bulan sehingga debitur menjadi menanggung tunggakan-tunggakan angsuran¹⁶.

Upaya-upaya yang dilakukan BCA terhadap debitur yang wanprestasi, yaitu: *pertama*, Pendekatan persuasif kepada debitur yaitu Upaya yang dilakukan BCA adalah mengadakan pendekatan secara persuasif kepada debitur dengan menelpon untuk menanyakan alasan atau sebaba-sebab debitur tidak melaksanakan atau memenuhi kewajibannya dan sekaligus mengingatkan debitur untuk membayar kewajibannya yaitu angsuran pokok dan bunga, jika adanya keterlambatan pembayaran, maka debitur wajib menyertakan pembayaran denda sebesar yang sudah ditentukan dalam perjanjian kredit¹⁷. *Kedua*, Memberikan surat panggilan kepada debitur, Upaya berikutnya bila debitur tetap tidak mengindahkan, yaitu dengan memberikan surat panggilan yang ditujukan kepada debitur untuk datang ke BCA sesuai dengan waktu, tanggal dan tempatnya untuk membicarakan masalah yang sedang dihadapi. Pihak BCA dan debitur dapat mencari solusi agar kredit tersebut dapat berjalan lancar, misalnya merubah jangka waktu pinjaman, merubah jadwal pembayaran angsuran dan lain sebagainya. *Ketiga*,

¹⁶ Wawancara Bapak Andy Kurnia selaku Account Officer BCA, tanggal 23 Juli 2012, Pukul 10.00 wib.

¹⁷ Wawancara Bapak Andy Kurnia selaku Account Officer BCA, tanggal 23 Juli 2012, Pukul 10.00 wib.

Negosiasi Dalam Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dikemukakan bahwa pada dasarnya segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dilakukan perdamaian adalah negosiasi. Jika dikaji lebih dalam maka dapat dikatakan bahwa kata-kata dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No, 30 tahun 1999 memiliki makna objektif dan hampir sama dengan yang terdapat dalam Pasal 1851 KUHPerdata, hanya saja negosiasi menurut rumusan Pasal 6 ayat (2) tersebut : Diberikan tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari dan Penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh para pihak.

Menurut Rajagukguk dalam penyelesaian sengketa, negosiasi biasa dilakukan berkenaan dengan transaksi ataupun perselisihan. Pendekatan yang terdapat dalam negosiasi yaitu "*problem solving*" menekankan pada pencapaian apa yang sebenarnya dikehendaki oleh kedua belah pihak¹⁸.

Dari penelitian yang dilakukan, dalam kasus debitur melakukan wanprestasi pada BCA banyak menempuh jalur ini dengan melihat karakteristik negosiasi yang tidak terlalu formal dan berbelit-belit menjadi sebab para pihak lebih banyak menempuh jalur penyelesaian ini dibandingkan dengan jalur penyelesaian lain, khususnya jalur peradilan.

Cara yang ditempuh BCA untuk penanganan kredit bermasalah (tidak membayar kewajibannya) seminimal mungkin yakni dengan : *pertama* Penjadwalan kembali (*reschedulling*) Yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya. *kedua* Persyaratan kembali (*reconditioning*) Yaitu perubahan sebagian atau seluruh

¹⁸ Erma Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000, Hal 104

syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. *Ketiga* Penataan kembali (*restructuring*) Yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa: penambahan dana bank dan/atau; konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan di BCA, hal tersebut lazim dilakukan. Hal tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menjaga kualitas kredit yang diluncurkan kepada debitor. Sehingga dalam tahap ini langkah-langkah untuk mencapai penyelesaian kredit bermasalah di BCA yang akan saling menguntungkan dan di capai solusinya yang tepat. Pencapaian solusi yang tepat ini dengan cara, konsultasi, negosiasi, atau penilaian ahli. Langkah ini dapat dilakukan apabila para pihak mendasarkan kepada itikad baik.

Dengan cara negosiasi ini apabila berhasil, pihak bank akan kembali mendapat angsuran yang tertunda atau terlambat beserta bunganya. Seringkali di dalam negosiasi ini nasabah berkeberatan akan besarnya bunga yang tertunggak, namun pihak bank dalam menghadapi ini sangat fleksibel dengan melihat keadaan yang ada pada nasabah. Sehingga ada upaya-upaya seperti : pelunasan tunggakan kredit, penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali dianggap suatu penyelesaian *win-win solution* yang dianggap paling baik.

- a. Dibuatkan surat pernyataan kepada debitur perihal kesanggupan membayar tunggakan

Upaya lain yang dilakukan oleh BCA apabila terjadi penunggakan kredit selama 3 (tiga) kali, maka dibuat surat pernyataan dari nasabah yang isinya mengenai kesanggupan nasabah untuk membayar tunggakan, dan kesediaan barang jaminan untuk dijual di bawah tangan. Waktu yang diberikan oleh BCA adalah 3 (tiga) bulan, dan selama jangka waktu tersebut BCA juga memberikan kesempatan untuk nasabah mencari pembeli barang yang dijadikan jaminan. Setelah 3 (tiga) bulan tidak ada tanggapan yang positif dari nasabah, maka BCA akan melakukan tindakan non litigasi, yang kemudian apabila nasabah masih sulit untuk diajak kerjasama maka akan dilanjutkan tindakan litigasi.

- b. Eksekusi jaminan

Tercantum dalam perjanjian kredit modal kerja antara BCA dengan debitur, khususnya dalam hal yang mengatur keharusan untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian melalui Pengadilan Negeri, dan BCA berhak menyatakan utang menjadi jatuh waktu dengan seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh debitur kepada BCA tanpa memperhatikan ketentuan pembayaran utang. Jika utang menjadi jatuh waktu, maka BCA berhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku kreditur untuk memperoleh pengembalian utang dengan jalan pelaksanaan hak-haknya terhadap debitur dan atau harta kekayaannya, termasuk tidak terbatas pada

pelaksanaan eksekusi hak-hak BCA terhadap agunan dan atau penjamin berdasarkan dokumen agunan serta akta pemberian jaminan¹⁹.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur akan sangat merugikan debitur sendiri karena sejak terjadinya wanprestasi tersebut debitur berkewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh kreditur. Sanksi yang akan diberikan oleh kreditur dapat meminta ganti kerugian sebagai akibat tidak dilaksanakannya kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur sesuai dengan perjanjian, diadakan peralihan resiko, meminta pembatalan perjanjian dan ganti rugi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pelaksanaan kredit modal kerja antara Bank Central Asia dengan Toko Bangunan Wahyu Putro Wonogiri berpedoman dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi BCA dan UU Perbankan, serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh BI dan instansi-instansi pemerintah lainnya. Proses pemberian kredit Bank BCA Cabang Slamet Riyadi Solo terdiri dari beberapa tahapan yaitu *screening*, pengumpulan data identitas debitur, melakukan survey guna verifikasi data, melakukan analisa resiko, proyeksi keuangan, kemudian dilakukan evaluasi kebutuhan keuangan untuk debitur yang terakhir adalah crosscheck struktur kredit. Pelaksanaan pemberian kredit modal kerja di BCA dalam tahap permohonan kredit, permohonan kredit tersebut

¹⁹ Isi perjanjian kredit antara BCA dengan Debitur Sugeng Wuryanto Pasal 14 tentang kejadian kelalaian No. 14.2 – 14.4.

berbentuk perjanjian baku. Isi perjanjian kredit modal kerja dari BCA meliputi jumlah dan tujuan penggunaan fasilitas kredit, batas waktu penarikan dan atau penggunaan fasilitas kredit, bunga dan provisi atau komisi, pembuktian utang, syarat-syarat penarikan dan atau penggunaan fasilitas kredit, pembayaran utang, denda, agunan dan atau jaminan, asuransi, pernyataan, hal-hal yang wajib dilaksanakan debitur, hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan debitur, kejadian kelalaian, penggunaan pembayaran, pajak, perubahan ketentuan perjanjian kredit, kuasa, ketentuan-ketentuan khusus, dan yurisdiksi.

Upaya penyelesaian Bank Central Asia apabila terjadi pihak debitur wanprestasi yaitu melakukan pendekatan persuasif kepada debitur, memberikan surat panggilan, negosiasi, membuat surat pernyataan kepada debitur perihal kesanggupan membayar tunggakan dan langkah terakhir adalah melakukan eksekusi jaminan.

2. Saran

BCA perlu menerapkan seluruh prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kreditnya karena yang diaplikasikan sekarang dalam perjanjian kredit Bank BCA belum seluruhnya. Meski demikian, prinsip kehati-hatian yang sudah tertulis dalam perjanjian kredit BCA sudah cukup mencerminkan prinsip kehati-hatian. Hal ini diperkuat dengan prinsip penilaian dalam prosedur pemberian kredit yang menjadi pendukung dari penerapan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh BCA. Prinsip kehati-hatian yang perlu ditambahkan dalam perjanjian kredit adalah penilaian kualitas aktiva.

Perlu dicari upaya yang lebih bijak dalam menyelesaikan debitur atau nasabah yang melakukan wanprestasi, hal ini dimaksudkan untuk memberikan solusi kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- _____, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelian Perusahaan*, BPFE, Yogyakarta, 2001.
- Achmad Busro, *Hukum Perikatan*, Oetama, Semarang, 1985.
- Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Denda Wijaya, *Manajemen Perbankan*. PT Galia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Edy Putra Tjeman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Erma Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1996.
- Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan, (aanvullend Recht), dalam Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- I.G. Ray Widjaya, *Merancang suatu Kontrak, Contract Drafting, Teori dan Praktek*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003.
- Idra Bastian dan Suhardjono, *Akuntansi Perbankan*, Buku Dua, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2006.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi keenam. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- _____, *Dasar-dasar Perbankan*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, Hal 109-114

Khadzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2004.

Marhainis Abdulhay, *Hukum Perdata Materil*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Cetakan keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*. Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.

O.P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Cetakan Kelima, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 2006.

Purwahid Patrik, *Azas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, FH. UNDIP, Semarang, 1999.

R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta, Bandung, 2004.

R. Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Salim, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Samuel M. P. Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, Grasindo, Jakarta, 2008.

Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2004.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1996.

Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003.

Internet :

www.klikbca.com/, *Produk dan Layanan BCA*, diakses 23 Juli 2012.

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Andy Kurnia selaku Account Officer BCA, tanggal 20 Juli 2012, Pukul 10.00 wib.

Wawancara Bapak Andy Kurnia selaku Account Officer BCA, tanggal 23 Juli 2012, Pukul 10.00 wib.

Arsip :

Contoh Draft Notariil perjanjian kredit dari Bank BCA atas nama debitur Sugeng Wuryanto. No. 153/149/KRD/SLO/VR selaku pemilik Toko Bangunan Wahyu Putro Wonogiri.